

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Strata Satu
Ilmu pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Teguh Pradana
NPM : 177310381

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Teguh Pradana
NPM : 177310381
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi :Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 April 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Teguh Pradana
NPM : 177310381
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 15 April 2021

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Sekretaris,

Budi Muliando S.IP., M.Si

Anggota

Rijalul Fikri S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,

Indra Safri S.Sos., M.Si



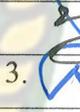
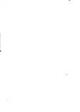
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **744/UIR-Fs/Kpts/2021** tanggal 07 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Teguh Pradana
NPM : 177310381
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pembangunan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " **86.3** " ; Huruf : " **A** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Mulianto S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 April 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS POLISI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 744 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- etapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Teguh Pradana
N P M : 177310381
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pembangunan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Budi Muliando S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Rijalul Fikri, S.Sos., MA. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sadriah Lahamid, M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 April 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Diusulkan Disampaikan Kepada :
1. th. Bapak Rektor UIR
2. th. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. th. Ketua Prodi.....
Ar sip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Teguh Pradana
NPM : 177310381
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Budi Muliando S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadirat Allah AWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu **“Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru ”**. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar Komprehensif pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
6. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
7. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada ayah dan Ibunda tercinta yaitu Alm Yahya dan Elwita, S.Pd, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakek dan Nenek ku, Kakak – Kakak dan Abangku (Syamsudin, Animar, Gravika Dian Lestari, S.K.M, Laras Pratiwi, S.Kep, Dicky Maulana, ST) dan beserta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar HIMIP terkhusus angkatan 2017 – 2019 yang telah memberi semangat, motivasi, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan doa serta dukungan dalam selesainya skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Abdul Rahman Hadi, Muhammaf Fajar Rizki Ginting, Aprizal, Putra, Afrinaldi, Sobri, Imam , Wahyu, Amek, Miftah, Alisha dan seluruh

kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

11. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 15 Maret 2021

Penulis,

Teguh Pradana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikiran	
1. Konsep Pemerintahan	23
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	25
3. Konsep Pembangunan	28
4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	33
5. Konsep Pendidikan.....	41
6. Konsep Kualitas Pendidikan	49
B. Penelitian Terdahulu.....	56
C. Kerangka Pikir	59

D. Konsep Operasional	60
E. Operasional Variabel	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Informan	64
D. Jenis Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data.....	66
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	67
H. Rencana Sistematika Penelitian	68

BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN

A. Profil Dinas	69
1. Sejarah.....	69
2. Keadaan Geografis	70
3. Visi dan Misi	71
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	72
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	73
D. Sumber Daya Organisasi	85
E. Sturuktur Organisasi	85

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	87
1. Usia Informan.....	87

2. Jenis Kelamin	88
3. Tingkat Pendidikan	89
4. Nama dan Identitas Informan	89
B. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru	91
1. Keberlanjutan Sosial	91
2. Keberlanjutan Lingkungan.....	95
3. Keberlanjutan Ekonomi.....	98
C. Hambatan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru	102
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.....	17
Tabel I.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsaniyah.....	18
Tabel I.3 Indeks Pembangunan Manusia	19
Tabel I.1 Alokasi Anggaran Pendidikan	20
Tabel I.1 Operasional Variabel	62
Tabel I.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	67
Tabel I.1 Sumber Daya Manusia.....	85
Tabel I.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	88
Tabel I.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	88
Tabel I.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	89
Tabel I.1 Nama dan Identitas Informan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	59
Gambar IV.1 Sturuktur Organisasi	86



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Pradana

NPM : 177310381

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : S1

Judul Usulan Penelitian : Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

15 April 2021



Teguh Pradana

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

TEGUH PRADANA
177310381

ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan secara sederhana merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada masa ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan yang mana salah satunya yaitu Pendidikan Berkualitas. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan di daerah untuk membantu mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dari keseluruhannya merujuk pada data yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi, rendahnya pengawasan, tidak ada komitmen yang jelas, minimnya anggaran dan data yang tidak valid. Oleh karena itu sangat penting bagi Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dengan masyarakat lingkungan sekolah dan swasta secara progresif agar terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Kualitas Pendidikan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN PEKANBARU CITY

TEGUH PRADANA
177310381

ABSTRACT

Sustainable Development is simply a development that meets the needs of today without reducing the needs of future generations. Sustainable Development has 17 objectives, one of which is Quality Education. Presidential Regulation No. 59 of 2017 on Implementing the Achievement of Sustainable Development Goals is a guideline for all development actors in the region to help succeed sustainable development. This study aims to find out the Development of Sustainability in Improving the Quality of Education in pekanbaru city and the factors inhibiting the implementation of Sustainable Development in Improving the Quality of Education in pekanbaru city. The method used in this study is qualitative approach. Data collection techniques using Observation, Interview, And Documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that Sustainable Development in Improving the Quality of Education in Pekanbaru City has not run optimally from the whole thing referring to the existing data. This is due to lack of participation, low supervision, no clear commitment, lack of budget and invalid data. Therefore, it is very important for the Education Office to work with the school and private community progressively in order to realize a quality and sustainable education.

Keywords: Sustainable Development, Quality of Education

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan konvensi pembangunan secara global yang dibahas dalam sidang umum oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) ke – 70 pada tanggal 25 - 27 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dihadiri oleh 193 kepala negara termasuk wakil presiden Indonesia yaitu Jusuf Kalla yang turut mengabsahkan agenda pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. Pada tanggal 1 Januari tahun 2016 , secara resmi *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) dan diberlakukan sampai tahun 2030.

Sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pertama kali digagas oleh Pemerintah Kanada, Peru, Guatamela, dan Uni Emirat Arab sebelum pada konferensi Rio de Janeiro pada bulan juni tahun 2012 untuk menjadi sebuah agenda pembangunan secara global. SDGs diharapkan mampu menyelesaikan agenda pembangunan dengan sebuah tantangan lama dan baru yang semakin melambung. Dengan demikian SDGs juga diharapkan akan menjadi andalan dalam agenda transformasi yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi pada saat ini. (Duanti & Arifin, 2018)

Sustainable Development Goals (Pembangunan Berkelanjutan) telah dirumuskan sebagai agenda pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang.

Dalam pembangunan berkelanjutan, generasi pada masa kini bukan pemilik sumber daya alam yang ada saat ini. Namun, generasi sekarang dianalogikan sebagai peminjam sumber daya alam dari generasi yang akan datang, sehingga dia harus menjaga dan memelihara serta mengembalikan sumber daya alam itu kepada generasi yang akan datang.

Sejarahnya, muncul spekulasi pada akhir tahun 60-an saat penggalakkan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam bahwa pembangunan yang saat itu dilakukan perlu mempertimbangkan kebutuhan di masa depan, sehingga tidak hanya fokus pada masa kini, namun juga menghiraukan aspek dimasa mendatang. (Hapsari, 2019)

Dari penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa selama dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup di masa sekarang, kita sangat dilarang untuk menghancurkan kapasitas sumber daya alam dan harus selalu berfikir kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Sebab gerakan pembangunan berkelanjutan selalu mengindahkan tentang menajaga kepentingan generasi masa depan.

Pembangunan Berkelanjutan mempunyai 17 tujuan dan 169 target untuk rencana aksi global pada 15 tahun ke depan (berlaku sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2030). Pembangunan berkelanjutan berlaku bagi seluruh negara (*universal*), sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju maupun negara berkembang memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target dari pembangunan berkelanjutan. Berikut tujuan transformatif dari pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global, diantaranya :

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), merupakan bentuk segala pengentasan kemiskinan di semua tempat.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan menggalakan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*Good Health dan Well*), menyuarkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), memastikan pendidikan berkualitas dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*), menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*), menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Pekerjaan yang layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*), membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduce Inequalities*), mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara dan di antara negara - negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*), membangun kota – kota serta pemukiman yang berkualitas dan aman serta berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*), menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi terhadap Iklim (*Climate Action*), bertindak cepat dalam memerangi perubahan iklim beserta dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*), melestarikan dan melindungi keberlangsungan laut serta kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*), melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*), meningkatkan perdamaian termasuk di dalam masyarakat untuk sebuah pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*), memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan. (Tristananda, 2018)

Dari tujuh belas target pembangunan berkelanjutan terbagi pada tiga lapisan konsentris. Lapisan pertama merupakan dalam yang bersangkutan langsung dengan individu yakni target pembagian di bidang pendidikan dan kesehatan. Lapisan kedua merupakan lapisan yang memiliki tujuan kesejahteraan lingkup masyarakat, yakni mengenai dengan distribusi, produksi, pelayanan pengiriman barang dan jasa termasuk kebutuhan air bersih, energi, makanan, pengolahan limbah dan sanitasi di kota – kota serta pemukiman penduduk. Lapisan ketiga mengenai lingkungan alami yang berkaitan dengan peran pemerintahan dalam sumber daya alam, kepemilikan umum di daratan, udara, dan lautan, termasuk adalah keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendukung dan menyetujui program pembangunan berkelanjutan. Komitmen Indonesia dalam mensukseskan tujuan – tujuan yang terdapat pada program pembangunan berkelanjutan terlihat dari penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 pada bulan juli tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan generasi selanjutnya.

Tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu terdiri dari kementerian dan pemerintah daerah, akademisi, ormas, serta pemangku

kepentingan lainnya. Peraturan Presiden menjadi suatu tonggak dan dasar hukum penetapan struktur dan mekanisme dari tata kelola pembangunan berkelanjutan nasional terkait dengan perencanaan, penganggaran, pembiayaan, dan pemantauan serta pelaporan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep multidisiplin dalam melihat pembangunan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini bukan merupakan konsep yang baru namun sudah tersirat secara jelas telah didalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu bentuk warga negara yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab adalah mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan kewajiban menjaga kelangsungan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Konsep ini juga telah tertuang didalam Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional 2010 – 2014 yaitu pendidikan untuk perkembangan , pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menyebutkan bahwa pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia, manusia yang menjadi rahmat bagi semesta alam yaitu manusia yang memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang (keberlanjutan internasional). Paradigma ini mengajak manusia

untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan kebijakan keseluruhan alam semesta. (Kemdiknas, 2010)

Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui sebuah proses dalam pendidikan dapat ditanamkan pemahaman mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan urgensinya. Pendidikan secara langsung berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dalam tiga area yakni : (1) Implementasi penduduk yang berpendidikan lebih mudah dalam menerima informasi dan mengimplementasikannya pada pembangunan berkelanjutan; (2) Pengambilan keputusan masyarakat yang baik dalam hal ekonomi, lingkungan dan sosial bergantung pada tingkat pendidikan masyarakat tersebut; (3) Kualitas hidup, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup manusia.

Namun juga mengarahkan pada pencapaian ketrampilan, perspektif, dan nilai – nilai yang memotivasi manusia dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan, berpartisipasi dalam masyarakat dan menerapkan prinsip berkelanjutan dalam kehidupan dan penerapan melibatkan pembelajaran mengenai isu lokal dan apresiasi isu global. (Hafizah Ghany, 2018)

Pendidikan termasuk tujuan ke- 4 di dalam pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Adapun target yang dicapai yaitu :

1. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki - laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.

2. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki - laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak - kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.
3. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki - laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau termasuk universitas.
4. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.
5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan latihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak - anak yang berada dalam situasi rentan.
6. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki - laki maupun perempuan mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung.
7. Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang

berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pencapaian salah satu target pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015 - 2019, Indonesia telah menargetkan 5 dari 7 target yang akan diselaraskan. Target - target tersebut, antara lain :

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki - laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki - laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki - laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.
4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak - anak dalam kondisi rentan.

5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki - laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kemudian tercantum pula 3 poin Sasaran Nasional RPJM 2015 - 2019 dalam melihat indikator kualitas pendidikan,yaitu :

1. Pemenuhan hak bagi seluruh siswa untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan primer dan sekunder.
2. Pemenuhan hak bagi seluruh warga untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar dan menengah.
3. Mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya akan kecintaan terhadap lingkungan.

Pendidikan di Indonesia bahkan di seluruh negara adalah hal yang paling penting dikarenakan menjadi hal yang dasar untuk menciptakan generasi dengan kualitas yang baik. Negara maju didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu. Jika kita lihat, kondisi di Indonesia masih saja memprihatinkan baik dari segi sarana maupun prasarana, bahkan di daerah - daerah yang jauh dari Ibu kota ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan, hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Selain tentang sarana dan prasarana ada sebuah sistem yang dianut di Indonesia yaitu sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia di Indonesia dalam berbagai tingkat usia dan golongan yang meliputi kemampuan kepribadian dan moralitas,

kemampuan intelektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, kemampuan jasmani dan kemampuan - kemampuan lainnya. Sistem pendidikan nasional merupakan holistik dari komponen - komponen yang saling berkaitan secara terpadu buat mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang - Undang Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tujuan tersebut belum mencapai sasaran yang ditetapkan pemerintah melalui program - program pendidikan setiap tahunnya.

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi menurut amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta ketrampilan - ketrampilan yang diperlukan yang implikasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PISA (*The Programme for International Student Assessment*) adalah sebuah program yang diinisiasi oleh negara - negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co- operation and Development*). PISA pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 untuk membantu negara - negara dalam

mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pasar internasional.

Subjek asesmen PISA terdiri atas tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains tanpa melihat pada kurikulum nasional. Sasaran hanya diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun melalui *random sampling*. Sasaran subjek dan objek tersebut diyakini oleh seluruh dunia memiliki legitimasi yang kuat dalam menggambarkan kualitas pendidikan di suatu negara.

Setiap tiga tahun PISA mengeluarkan hasil asesmennya. Jika hasilnya baik dan negara tersebut mampu berada di level atas dalam indeks capaian maka dianggap sebagai negara yang memiliki standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Sebaliknya jika negara tersebut memperoleh hasil di bawah rata - rata dan menempati level bawah dalam indeks PISA maka dianggap memiliki kualitas pendidikan di bawah standar kebutuhan pasar global dan dituntut untuk segera membenahi sistem pendidikan nasionalnya. (Pratiwi, 2019)

Menurut hasil studi PISA tahun 2018 yang telah dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Berdasarkan hasil tersebut Peringkat PISA Indonesia pada tahun 2018 turun apabila dibandingkan dengan hasil PISA pada tahun 2015. Studi pada tahun 2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak.

Adapun untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah alias peringkat 74. Skor rata - rata Indonesia adalah 371, berada di bawah Panama yang memiliki skor rata - rata 377. Sedangkan peringkat

pertama diduduki oleh China dengan skor rata - rata 555. Posisi kedua ditempati oleh Singapura dengan skor rata - rata 549 dan Makau peringkat tiga dengan skor rata - rata 525. Sementara Finlandia yang kerap dijadikan percontohan sistem pendidikan, berada di peringkat 7 dengan skor rata - rata 520.

Lantas untuk kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah (73) dengan skor rata - rata 379. Indonesia berada di atas Arab Saudi yang memiliki skor rata - rata 373. Kemudian untuk peringkat satu, masih diduduki China dengan skor rata - rata 591. Lalu untuk kategori kinerja sains, Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah (71), yakni dengan rata - rata skor 396 berada di atas Arab Saudi yang memiliki rata - rata skor 386. Peringkat satu diduduki China dengan rata - rata skor 590. (Tohir, 2019)

Human Development Index (HDI) yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) mulai berubah sejak tahun 2010. Seperti diketahui, *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing - masing mewakili dimensi pembangunan manusia (IPM) yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup. *Human Development Report* UNDP, IPM Indonesia hingga 2018 masih berada pada peringkat 113 dari 188 negara jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia yang berada di peringkat 59 . Peringkat 113 tersebut berdasarkan kategori IPM dunia yang terdiri atas empat kategori, yaitu *Very High Human Development* (negara berperingkat 1 - 51), *High Human Development* (negara berperingkat 52 - 106), *Medium Human Development* (negara

berperingkat 107 - 147) dan *Low Human Development* (negara berperingkat 148 - 188). Berdasarkan kategori tersebut sesuai dengan peringkatnya Indonesia berada pada kategori *Medium Human Development*. (Ferawati, 2018)

Undang – Undang Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ujung tombak pelaksanaan Undang – Undang Tahun 1945 tersebut ialah di daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah.

Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki potensi yang unik karena berada tepat di tengah provinsi riau yang dikelilingi daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan di jantung pulau sumatera. Kota Pekanbaru berada pada jalur lintas timur sumatera dan sekaligus berfungsi sebagai pintu gerbang indonesia bagian barat menuju kawasan Asia, Amerika, dan Eropa. Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki visi “Smart City Madani” yaitu kota metropolitan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, ilmu dan teknologi yang ber peradaban yang ditopang oleh penguasaan iman.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang masih memiliki permasalahan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti kemiskinan dan kesenjangan penduduk, perubahan iklim serta pendidikan. Dalam hal pendidikan, daerah ini masih mengalami masalah dalam memahami materi pendidikan dan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meningkatkan kualitas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana juga dinyatakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDG's) Provinsi Riau untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya yaitu pendidikan berkualitas.

Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas - Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Beberapa program dinas pendidikan kota pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu

1. Program PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan ketrampilan dan pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan cocok bagi siswa.
2. Program Adiwiyata adalah program yang membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan

upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

3. Program PIP merupakan program bantuan yang disalurkan melalui kartu Indonesia pintar dengan tujuan untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak.

Batasan permasalahan penelitian ini adalah pembangunan berkelanjutan dalam konteks pendidikan berkualitas. Pembangunan berkelanjutan dikelompokkan ke dalam tiga pilar yaitu, pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk pilar pembangunan sosial. Dalam mewujudkan kemajuan dan kesuksesan suatu pembangunan di kota pekanbaru mengandalkan kualitas pendidikan sebagai pilar pembangunan sosial karena kota pekanbaru tidak memiliki sumber daya alam sebagai modal, maka yang menjadi modal pembangunan adalah manusia (SDM) yaitu manusia berkualitas (masyarakat unggul) atau yang disebut masyarakat madani.

Berkenaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah kota pekanbaru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017- 2022 memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani” . Dalam meraih visi tersebut pemerintah kota pekanbaru memiliki misi dalam bidang pendidikan yaitu, terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa dan berilmu serta mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan peningkatkan suatu kualitas pendidikan. Tujuan dan sasaran pada setiap

misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut. Namun, didalam Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dijelaskan juga permasalahan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu masih rendahnya Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan sekolah. Ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah relatif masih tinggi. Berikut adalah jumlah Sekolah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, Tahun 2019/2020.

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman	21	47	68
Payung Sekaki	11	18	29
Bukit Raya	18	9	27
Marpoyan Damai	19	21	40
Tenayan Raya	28	18	46
Lima Puluh	17	8	25
Sail	7	1	8
Pekanbaru Kota	4	7	11
Sukajadi	20	7	27
Senapelan	16	-	16
Rumbai	15	7	22
Rumbai Pesisir	21	10	31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2020

Berdasarkan data – data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah dasar di Kota Pekanbaru memiliki jumlah sekolah swasta terbanyak daripada

sekolah negeri, hal ini dapat dilihat dari kapasitas jumlah sekolah di tiap – tiap kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Namun, kuantitas dari jumlah sekolah jangan sampai mengabaikan kualitas yang akan diberikan sekolah nantinya kepada peserta didik terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsaniyah (MTS) Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, Tahun 2019/2020.

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Tampian	4	28	32
Payung Sekaki	4	15	19
Bukit Raya	3	11	14
Marpoyan Damai	6	15	21
Tenayan Raya	6	20	26
Limapuluh	7	5	11
Sail	1	3	4
Pekanbaru Kota	-	2	2
Sukajadi	4	8	12
Senapelan	4	9	13
Rumbai	6	10	16
Rumbai Pesisir	4	10	14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tantangan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan terutama di bidang peningkatan kualitas pendidikan di kota pekanbaru. Dalam hal ini kota pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang menjadi contoh bagi kabupaten lainnya terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terutama bidang pendidikan. Dengan demikian pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan tindakan yang menjadikan pembangunan berkelanjutan bukan sebagai agenda biasa tapi agenda global dan dilakukan dengan bersama demi mencapai tujuan yang optimal. Namun berdasarkan data kualitas pendidikan di kota pekanbaru masih rendah ini terlihat

dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan sebagai hasil pelaksanaan kewenangan pemerintah pada pembangunan khususnya pendidikan. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru, 2010 – 2019

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Rata – Rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Hidup	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan
2010	77,34	10,67	13,64	71,42	13 633
2011	77,71	10,84	13,74	71,46	13 719
2012	77,94	10,88	13,83	71,51	13 805
2013	78,16	10,93	13,93	71,54	13 891
2014	78,42	10,95	14,07	71,55	14 023
2015	79,32	10,97	14,86	71,65	14 126
2016	79,69	11,20	14,87	71,70	14 225
2017	80,01	11,21	14,93	71,75	14 547
2018	80,66	11,22	15,34	71,94	14 778
2019	81,35	11,43	15,37	72,77	15 206

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu pendidikan. Kualitas pendidikan menjadi rujukan dalam pembangunan manusia terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru meningkat namun tergolong lambat dan masih jauh dari optimal .

Rendahnya kualitas pendidikan disebabkan oleh kurangnya kapasitas sumber daya untuk mendukung kemajuan suatu kualitas pendidikan yaitu salah satunya adalah keuangan atau anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru. Anggaran pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan membantu memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Namun anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru tidak memenuhi 20 % dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945, bahkan terjadi penurunan pada anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru. Berikut adalah tren alokasi anggaran di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Dana Pendidikan di Kota Pekanbaru

Tahun	Nominal
2015	344.000.000.000
2016	442,500.000.000
2017	376,900.000.000
2018	211,260.000.000
2019	190,100.000.000

Sumber : Kemendikbud Tahun 2019

Selain data yang diperoleh penulis juga menemukan data temuan dilapangan tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Minimnya partisipasi oleh stakeholder dalam hal ini dinas pendidikan, masyarakat lingkungan sekolah dan swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang progresif.
2. Rendahnya Kualifikasi SDM sekolah dan dinas pendidikan terutama dalam menerapkan pedagogi digital pada masa pandemi saat ini.

3. Rendahnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pembelajaran.
4. Administrasi yang belum lengkap dari pihak siswa menyebabkan bantuan belum bisa diberikan kepada siswa yang membutuhkan.
5. Rendahnya pengawasan atau monitoring dalam kesuksesan kegiatan yang dijalankan disekolah sebab sifatnya ini adalah pembangunan yang berkelanjutan.
6. Adanya kesalahan data yang menyebabkan bantuan yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ **Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yang penulis teliti adalah “ **Bagaimana Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru ?** “

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk melihat faktor – faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori - teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil -hasil ilmu pengetahuan baru.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam Pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah secara umum dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif (*executive heavy*). “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. (Munaf et al., 2018)

Menurut Syafiie (2011:8) pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu melakukan serta dengan kharismatik

menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan dikarenakan memenuhi syarat - syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Jika dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan arti luas dan pemerintahan arti sempit, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif) sedangkan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang - undangan (legeslatif) dan yang melaksanakan (yudikatif).

Menurut Ndraha (2000:78-79) Pemerintah itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan yang kedua fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer itu yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa - jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih terlalu lemah dan tidak berdaya (*powerless*) serta termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarananya.

Ndraha juga mengatakan dalam (Nazir, 2018) Pemerintahan merupakan suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Sementara menurut Labolo dalam (Mulianto, 2014) Pemerintahan dari aspek manajemen, terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi

petunjuk,memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan Kesemuanya itu membuat pemerintah harus bekerja secara maksimal agar setiap Peraturan peraturan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan menuju pada tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan menurut Rasyid dalam (Febrian, 2014) pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Dari berbagai macam pengertian dari pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilengkapi dengan alat – alat kelengkapan negara.

2. Pemerintahan Daerah

Peraturan PerUndang - Undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autonomic*” yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang - undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonom yang seluas - luasnya.

Pemberian Otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah dijalankan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum yang ada. Jika dilihat dari Undang - Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

3. Meringkankan beban pemerintahan pusat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah.
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan.

Ciri - ciri daerah otonom :

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri.
4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja.
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Ndraha menjelaskan masyarakat membutuhkan otonomi dalam rangka menyediakan kebutuhan dan kelanjutan hidupnya, mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya, sampai pada tingkat kualitas tertentu, sehingga daerah itu layak disebut daerah otonom. (Nazir, 2018)

Menurut kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan

ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desentralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang artikan sebagai pemberian kekuasaan. Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai macam pengertian dari pemerintahan daerah maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994) . Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemberantasan kemiskinan. Dalam pembangunan tersebut terkandung suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya baik dalam jangka pendek (*short run*) maupun dalam jangka panjang (*long run*). (Mukhlis, 2009)

Pembangunan dapat diartikan secara dinamis dari waktu ke waktu. Secara tradisional, pembangunan hanya diartikan secara sederhana sebagai upaya - upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1970-an pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan perkapita sehingga masalah - masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan distribusi pendapatan kurang

mendapat perhatian. Pada tahun 1990-an pengertian pembangunan berkembang pada perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas hidup dibanding semata - mata peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2000-an dikenal konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan perkembangan pengertian pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. (Niken Pratiwi et al., 2018)

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa / *nation-building* “. Dari definisi diatas akan muncul tujuh ide pokok:

2. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap - tahap yang bersifat tanpa akhir.
3. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
4. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
5. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan.
6. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
7. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.

8. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain. (Siagian, 2001)

Pembangunan mula - mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat dkk, 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha - usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai - nilai dan sikap - sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita - citakan dalam proses transformasi itu ada dua hal yang

perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi, 2011:9)

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007), mengemukakan adanya tahapan - tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pemberdayaan

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika, teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang

bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat.

Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah - masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah.

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah program yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia dan keberlangsungan bumi. SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan penerus dari MDGs (*Millenial Development Goals*) yang memiliki filosofi yang sama yakni menanggapi tantangan pembangunan dalam skala global. (Pujayanti, 2020)

Sustainable Development Goals merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* karena :

1. SDG's lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pedanaan, selain bantuan negara maju juga ada sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one Left Behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan medis.
6. MDG's hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDG's menargetkan untuk memutuskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
7. SDG's tidak hanya memuat tujuan tapi juga sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Menurut Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan ekonomi.

Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.

Menurut Sutamihardja dalam (Nurkholis, 2016), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya beberapa hal, yaitu :

- a. Pemerataan manfaat hasil – hasil pembangunan antar generasi yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas – batas yang wajar dalam kendali ekosistem serta diarahkan pada sumber daya alam yang lestari dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang tidak *renewable*.

- b. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Salim (1993) menjelaskan terdapat lima unsur dalam dasar pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama, merangsang sikap kerja berasaskan kesadaran saling memerlukan antara yang satu sama lain.
- b. Kedua, kemampuan menyesuaikan keperluan dengan kemampuan sumber alam.
- c. Ketiga, mengembangkan sumber manusia yang mampu mengusahakan pembangunan tanpa merusakkan alam sekitar.
- d. Keempat, mengembangkan kesadaran alam sekitar dalam masyarakat

- e. Kelima, lahirnya kesadaran mencintai alam sekitar.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya merupakan pembangunan ekonomi namun juga pembangunan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Keberlanjutan adalah kunci utama menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi dunia, seperti akses makanan yang tidak tercukupi, degradasi lingkungan, penurunan sumber daya alam dan hilangnya hutan serta memburuknya gizi dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (kemiskinan). Pembangunan berkelanjutan adalah tantangan umum bagi komunitas global, yang telah menjadi tujuan dan diakui secara luas bagi masyarakat.

Reksohadiprodjo dan Pradono (1994) menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan dasar pengurusan sumber daya alam dan tenaga yang bertanggungjawab dan harus memenuhi lima syarat. Kelima syarat tersebut adalah:

- a. Menjamin kesinambungan pengeluaran dan alam sekitar yang baik di masa yang akan datang
- b. Menggerakkan ekonomi ke arah penggunaan yang lebih baik
- c. Mencegah kerusakan lingkungan
- d. Tenaga yang bertanggung jawab
- e. Tidak menimbulkan resiko besar pada generasi yang akan datang

Keraf (2006) menjelaskan terdapat tiga prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Prinsip demokrasi, prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan dilaksanakan memenuhi keinginan seluruh rakyat untuk kepentingan bersama. Aspek penting dalam prinsip demokrasi adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat, penyertaan masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya, pencapaian kesepakatan yang jujur dan terbuka dan mesti ada tanggung jawab kepada masyarakat tentang agenda pembangunan.
- b. Prinsip keadilan, prinsip keadilan merupakan wujud jaminan bahwa semua orang dan kumpulan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan bersama - sama menikmati hasil pembangunan. Untuk memenuhi prinsip ini terdapat beberapa tuntutan yang perlu dipenuhi. Pertama, perlu wujud layanan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat. Kedua, keperluan sebaran manfaat dan beban secara seimbang antara semua orang dan kelompok masyarakat. Ketiga, wujud peluang yang sama bagi generasi masa datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber ekonomi yang ada. Keempat, terdapatnya pembagian kerugian (akibat proses pembangunan) yang seimbang atau proporsional baik oleh negara ataupun oleh kelompok yang menimbulkan kerugian.
- c. Prinsip keberlanjutan, membolehkan penyusunan agenda pembangunan dalam jangka panjang.

Menurut Heal dalam Fauzi (2004), konsep keberlanjutan, paling tidak mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi waktu karena keberlanjutan pasti menyangkut apa yang terjadi di masa mendatang. Kedua, adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Haris dalam (Fauzi, 2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinuitas untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral.
2. Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber - sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial adalah keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Dari berbagai macam pengertian tentang pembangunan berkelanjutan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan sumber daya alam masyarakat pada saat sekarang tanpa harus mengurangi sumber daya alam bagi generasi yang akan

datang untuk mencukupi kebutuhannya yang tidak terlepas dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan berkonsentersasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada empat butir prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan (Zulkifli,2013). Prinsip - prinsip tersebut meliputi :

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
2. Menghargai keaneragaman (*diversity*). Keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang.
3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri.
4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk

menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

5. Konsep Pendidikan

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut H. Fuad Ihsan (2005: 1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi - potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai - nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha - usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai - nilai dan norma - norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Pendidikan mempunyai manfaat sosial dan manfaat individu. Manfaat sosial berarti pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat bahwa cara memberi subsidi kepada siswa atau mahasiswa, akan memberikan manfaat efektif bagi masyarakat. Sedangkan manfaat individu pendidikan adalah adanya perolehan pendapatan dan akses kepada pekerjaan yang layak. Peran pendidikan

lainnya adalah sebagai suatu indikator dari pertumbuhan peradaban Islam. (Hasan Asari, 1994 :15)

Crow and Crow dalam Sukma Alfalah (2018) mengatakan pendidikan sering disebut sebagai proses dan hasil. Walaupun demikian, pengertian pendidikan (*education*) adalah melayani manusia dalam hubungannya dengan manusia lain secara terus menerus dalam kehidupannya yang efektif. Sedangkan pendidikan secara umum adalah proses pendewasaan individu melalui pengalaman hidup. Di dalam proses pendewasaan itu individu melakukan berbagai aktivitas yang dinamakan pengalaman atau belajar yang membentuk berbagai hal mulai dari berpikir, bergerak, merasa, berbicara, bahkan bermimpi sekalipun. Dengan hasil perilaku itu maka terbentuklah hukum, undang - undang, lembaga sosial dan keagamaan, teknologi, bahasa, dan sebagainya dari generasi ke generasi.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter anak bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melahirkan generasi intelektual yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan bangsanya.

Pembangunan Pendidikan, merupakan salah satu bidang garapan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan bentuk yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan

mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan.

Dalam Pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan UNESCO, pendidikan adalah salah satu program pembangunan yang terus menerus dilaksanakan, karena pada dasarnya fungsi pendidikan akan tetap abadi dalam bentuk kehidupan sosial. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat mewujudkan tiga hal, yaitu : Pertama, dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan. Kedua, mampu berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. ketiga, memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Bagi sebagian besar orang miskin, pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting. Ketika modal yang lain tidak mereka miliki, terutama modal berupa uang atau barang, hanya dengan modal pendidikanlah mereka dapat berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan (Sulistiyastuti, 2007). Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari aspek komunikasi pendidikan sebagai langkah awal untuk mensukseskan program - program pendidikan yang berkelanjutan.

Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Menurut Quraish Shihab dalam Hakim (2016) disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai - nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai - nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 ada 9 (sembilan) karakter atau ciri sumber daya manusia Indonesia yang dilahirkan melalui proses pendidikan nasional yaitu: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) menjadi warga Negara yang demokratis, dan (9) bertanggung jawab. Kesembilan karakter manusia Indonesia ini telah mencakup kelima ranah/potensi pendidikan. Pengembangan potensi pikir (kecerdasan intelektual) yaitu ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan kreatif. Pengembangan potensi rasa (kecerdasan sosial) ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga Negara

yang demokratis. Pengembangan potensi karsa (kecerdasan psikis atau jiwa) ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengembangan potensi religi (kecerdasan spiritual) ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengembangan potensi raga (kecerdasan kinestetik) ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cakap.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendekatan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun, kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai visi berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme penyelenggaraan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu terdapat pendidikan prasekolah yang bukan merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

Saat ini pemerintah telah memiliki program pendidikan nasional yang amat strategis, yaitu peningkatan relevansi, efisiensi, dan kualitas pendidikan. Dari program itu memang bisa diyakinkan bawa pendidikan nasional Indonesia secara

makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar - benar memiliki keunggulan kompetitif. Walaupun demikian, pelaksanaan program itu tidak semudah rumusnya, masih ada persoalan esensial yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional.

Paradigma sistem pendidikan nasional seharusnya mencakup berbagai faktor diantaranya input, proses dan output pendidikan. Output pendidikan merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan, dan input menjadi masukan yang penting bagi output, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut yang terkait dengan individu - individu dan sumber - sumber lain yang ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan output pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, masalah semacam kurikulum yang efektif dan menyenangkan serta manajemen yang menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah.

Dari berbagai macam pengertian tentang pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatur dalam Pasal 3 sebagai pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Haryanah, 2004)

6. Konsep Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. (Soedomo:2008)

Indikator Kualitas Pendidikan Menurut Nanang Hanifah dan Cucu Suhana dalam (Pribadi, 2017), bahwa indikator dalam suatu pendidikan adalah mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan - harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Seperti terurai berikut ini:

- a. Input sumber daya, meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang dan bahan).
- b. Input perangkat lunak, meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang - undangan, deskripsi tugas, rencana dan program.
- c. Input harapan - harapan, berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran - saran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu tinggi rendahnya suatu input dapat diukur dari tingkat kesiapan Proses dapat dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian dan penyesuaian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu memotivasi dan minat belajar dan benar - benar mampu memberdayakan peserta didik. Evaluasi pun harus menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak boleh ditinggal sampai akhir studi. Hasilnya harus dibicarakan dengan murid dengan tujuan untuk melengkapi hasil evaluasi. Sifat melibatkan seluruh elemen akan sangat membantu dalam membangun kecakapan analitis para pelajar.

Kualitas dalam konteks pendidikan adalah mengacu pada prestasi yang dicapai oleh anak didik atau sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, (misalnya ujian umum, UAS, EBTA dan UNAS).

Dapat pula prestasi dibidang lain, seperti prestasi disuatu cabang olahraga, seni atau ketrampilan tambahan tertentu.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal setelah sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu :

- a. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- f. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Suharsaputra:2010). Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang dicapai oleh siswa atau suatu pendidikan dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dalam maupun dari luar. Faktor - faktor tersebut antara lain :

- a. Sumber daya
- b. Pertanggung jawaban (*accuantability*)
- c. Kurikulum
- d. Personil sekolah

Dalam bidang pendidikan, hanya konsep relatif yang sering ditemukan. Dalam konsep ini, kualitas pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya baik pelanggan internal maupun eksternal. Pelanggan internal, yaitu kepala sekolah, guru dan staf pendidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok yaitu, (1) peserta didik (pelanggan eksternal primer), (2) orang tua dan para pemimpin

pemerintah (pelanggan ekseternal sekunder), dan pasar kerja, pemerintah dan masyarakat luas (pelanggan eksternal tersier). (Sallis, 2006)

Salah satu indikator dari pendidikan yang berkualitas adalah adanya proses pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat efektifitas dari proses pembelajaran, salah satu cirinya adalah pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk aktif dalam berinteraksi dengan berbagai macam sumber belajar, bukan hanya bergantung pada tenaga pendidik. Peserta didik yang aktif dalam mencari sumber belajar tentunya mempunyai peluang yang tinggi sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif, efisien dan tentunya menyenangkan. Setidaknya terdapat 2 (dua) indikator utama suatu pembelajaran disebut berkualitas, yaitu proses dalam pembelajaran dan hasil pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dimulai dengan melakukan perbaikan - perbaikan terhadap proses pembelajaran yang mengarahkan terjadinya pembelajaran yang mandiri bagi peserta didik, bukan lagi pembelajaran yang terpusat pada instruksi dari tenaga pendidik. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang terjadi sangat dinamis seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah menerapkan AVA (*Audio Visual Aid*) sebagai salah satu media pembelajaran di kelas. Untuk menciptakan proses tersebut, yang paling penting adalah kesiapan untuk menata lingkungan belajar yang memotivasi, menyenangkan dan menggairahkan bagi siswa.

Hal inilah yang sering terabaikan dalam pengelolaan pendidikan saat ini. Sebagian besar pengelola pembelajaran yang terfokus pada hasil tanpa

memperhatikan peserta didik. Setelah memperbaiki proses pembelajaran, barulah melakukan pembahasan mengenai hasil pembelajaran. Untuk melihat seberapa berkualitasnya suatu pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar peserta didik yang dapat menikmati proses pembelajaran selain melihat ketercapaian tujuan - tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum. Indikator ini dapat tercermin dari sikap siswa yang bergairah dan aktif dalam belajar. Bukan proses belajar yang muncul karena keterpaksaan sehingga pembelajaran pun diikutinya dengan setengah hati. (Cecep Abdul Cholik, 2017)

Dalam pembangunan berkelanjutan ada beberapa indikator tentang kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, yaitu :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal
3. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
6. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
10. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi

Dari berbagai macam pengertian tentang Kualitas Pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas pendidikan merupakan proses pembelajaran yang memenuhi input dan output dalam pendidikan seperti persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah, angka kelulusan pendidikan dasar hingga atas dan angka partisipasi kasar pendidikan dasar hingga tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu

1. Nelta Wulandari melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan pangan di Provisis Riau”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap salah satu tujuan dari SDG’s dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan diantaranya, (a) Objek yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap tujuan dari SDG’s yaitu ketahanan Pangan sementara objek yang dilakukan penulis terhadap tujuan dari SDG’s yaitu kualitas pendidikan (b) Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sementara penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020 (c) Lokus penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Riau sementara lokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kota Pekanbaru.
2. Diah Riski Hardiana, Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDG’S) Dalam Pembangunan Kota Berlanjutan Di Jakarta “ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap salah satu tujuan dari SDG’s dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan diantaranya (a) Objek yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap tujuan dari SDG’s yaitu tentang Kota Berkelanjutan sementara objek yang dilakukan penulis terhadap tujuan dari SDG’s yaitu Kualitas

Pendidikan (b) Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sementara penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020 (c) Lokus penelitian terdahulu dilakukan di Jakarta sementara lokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kota Pekanbaru.

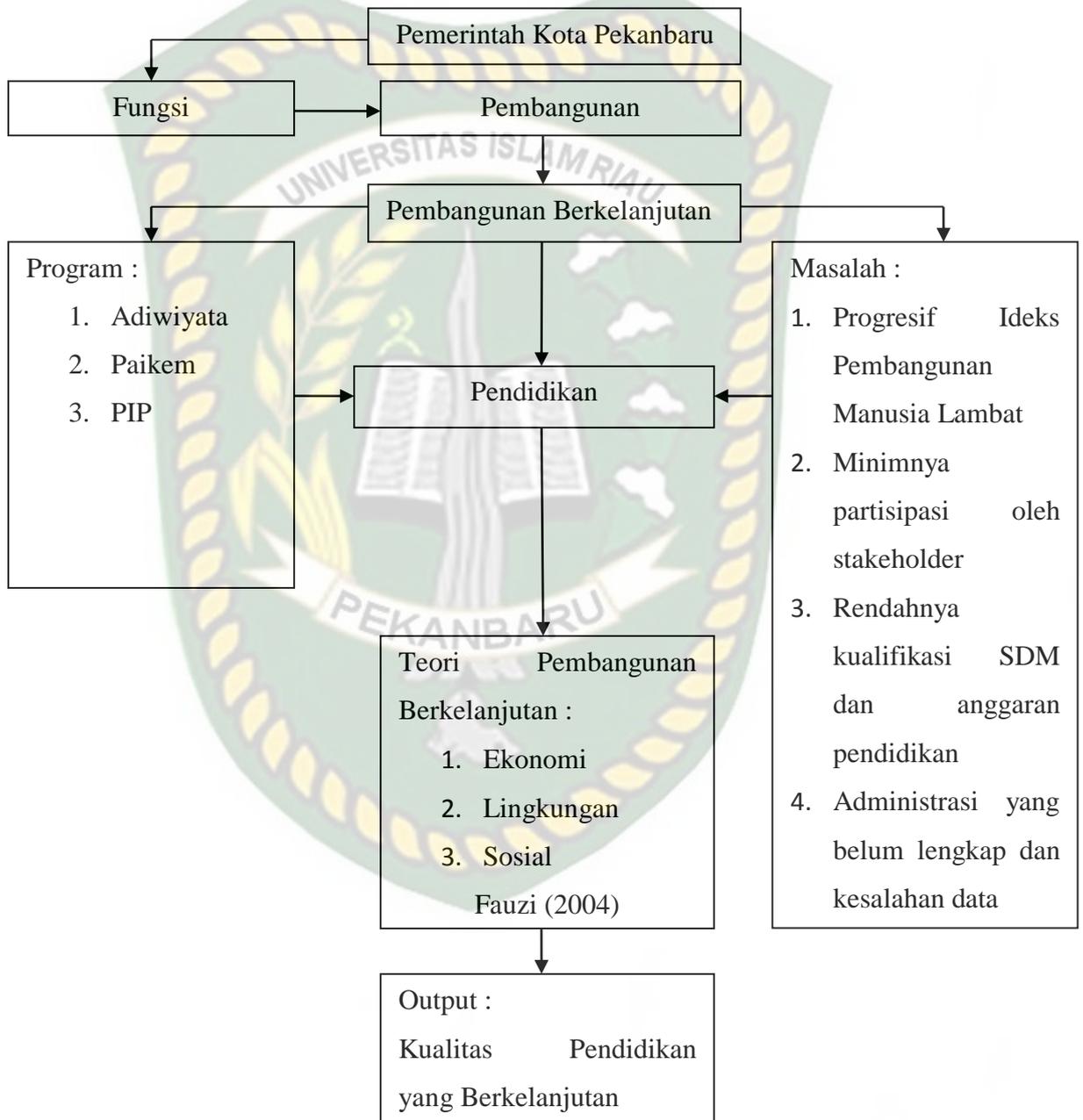
3. Ishartono, Melakukan penelitian yang berjudul “ *Sustainable Development Goals* (SDG’s) dan Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap salah satu tujuan dari SDG’s dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan diantaranya, (a) Objek yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap tujuan dari SDG’s yaitu tentang Kemiskinan sementara objek yang dilakukan penulis terhadap tujuan dari SDG’s yaitu Kualitas Pendidikan (b) Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sementara penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020 (c) Lokus penelitian terdahulu dilakukan di Indonesia sementara lokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kota Pekanbaru.
4. Layla Nazilatul Rizqiyyah, Melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) USAID dalam Pelaksanaan SDG’s di Indonesia Untuk Mengatasi Perubahan Iklim (Studi pada APIK USAID Regional Malang Raya) “. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap salah satu tujuan dari SDG’s dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Namun juga

memiliki perbedaan diantaranya, (a) Objek yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap tujuan dari SDG's yaitu tentang Perubahan Iklim sementara objek yang dilakukan penulis terhadap tujuan dari SDG's yaitu Kualitas Pendidikan (b) Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sementara penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020 (c) Lokus penelitian terdahulu dilakukan di Kota Malang sementara lokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kota Pekanbaru.

5. Istri Larasati Widyastuti, Melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Perempuan dan Penduduk Dalam Upaya Mencapai Target *Sustainable Development Goals* di Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap salah satu tujuan dari SDG's dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan diantaranya, (a) Objek yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap tujuan dari SDG's yaitu tentang Kesetaraan Gender sementara objek yang dilakukan penulis terhadap tujuan dari SDG's yaitu Kualitas Pendidikan (b) Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sementara penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020 (c) Lokus penelitian terdahulu yaitu Indonesia sementara lokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan merupakan organisasi / lembaga yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilengkapi dengan alat – alat kelengkapan negara.
2. Pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.
3. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan sumber daya alam masyarakat pada saat sekarang tanpa harus mengurangi sumber daya alam bagi generasi yang akan datang untuk mencukupi kebutuhannya yang tidak terlepas dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.
4. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Kualitas pendidikan merupakan proses pembelajaran yang memenuhi input dan output dalam pendidikan seperti persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah, angka kelulusan pendidikan dasar hingga atas dan angka partisipasi kasar pendidikan dasar hingga tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variable

Tabel II.2: Konsep Operasional Variabel Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item yang dinilai 4
Menurut Fauzi (2004), Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang	Pembangunan Berkelanjutan	Keberlanjutan Sosial	a. Pendidikan Primer b. Pendidikan Sekunder
		Keberlanjutan Lingkungan	a. Pendidikan lingkungan (Adiwiyata) b. Budaya lingkungan
		Keberlanjutan Ekonomi	a. Pendidikan Berkualitas b. Pendidikan Terjangkau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Pembangunan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru adalah metode Kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain - lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan, dan data - data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, ide atau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pembangunan Perkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Jalan Pattimura , Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena

Kota Pekanbaru secara wilayah sangat strategis dan memiliki potensi yang unik karena berada tepat di tengah provinsi Riau dan di jantung pulau Sumatera serta sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju kawasan Asia, Amerika, dan Eropa yang memiliki visi Smart City Madani. Kota Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan industri hingga pusat pelayanan jasa – jasa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan memahami mendalam bagaimana pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru. Adapun informan Dalam Penelitian ini yaitu :

1. Kasi Kurikulum dan Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru sebagai key Informan
2. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Pekanbaru sebagai informan
3. Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru sebagai informan
4. Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru sebagai informan
5. Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru sebagai informan
6. Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru sebagai informan

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik dan akurat, keterangan - keterangan dan data yang diperlukan penulis, dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh jawaban.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, kelembagaan resmi, referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku, sumber tersebut dapat berupa literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat

dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Inteviu* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain - lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Jul - Sep				Okt				Nov				Des				Jan- Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab di gambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam bab ini di uraikan tentang studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang di lakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan di bahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi profil, keadaan geografis, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

A. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Pada awal berdirinya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terdiri dari dua instansi, pertama adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dinas yang khusus mengurus bidang pendidikan untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang ada di Kota Pekanbaru, kedua adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini khusus mengurus bidang pendidikan untuk tingkat SMP dan SMA. Kemudian setelah dilakukan otonomi daerah di Kota Pekanbaru, maka kedua instansi pemerintahan ini digabungkan hingga berubah namanya menjadi Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu dinas yang ada dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kota Pekanbaru yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang telah melekat kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, maka kemajuan pemerintah Kota

Pekanbaru sangat tergantung kepada komitmen pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi daerah yang ada, termasuk potensi Sumber Daya Manusia.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang diserahkan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan yang hanya mengurus SD dan SMP. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru.

2. Keadaan Geografis

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km²

Batas - batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai

Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia. Sedangkan data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) wilayah 18 Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 2019 berkisar 33°-36°C dengan rata-rata 34°C, sinar matahari 48,4%, kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3- 6 knot/jam¹⁶⁹.

3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah :

1. Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Dinas Pendidikan Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas, Madani Menjadi Rujukan Nasional”.

2. Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

- a. Mewujudkan pelayanan prima di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- b. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua jenjang dan jenis pendidikan.

c. Mewujudkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Diantara Tugas Pokok Dinas Pendidikan yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Diantara Fungsi Dinas Pendidikan yaitu :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan.
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan.
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah.

11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijazah serta perpustakaan sekolah.

C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi kepala dinas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan tata usahaan dinas.
- b. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan.
- d. Penyusunan dan perumusan program dan anggaran dinas pendidikan.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pendidikan.

2. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas pendidikan kota pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta koordinasi pelaksanaan program formasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai tanggungjawab.

(1) Sekretaris terdiri dari:

a). Sub Bagian Umum:

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksana kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi pengaturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan urusan protokol, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga.

b). Sub Bagian Keuangan:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c). Sub Bagian Program:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), rencana kegiatan anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

b. Pengolahan dan validasi data pendidikan untuk pengembangan dan pengambilan kebijakan.

c. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan system informasi pendidikan.

d. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan laporan.

e. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - e. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
- a). Seksi Kurikulum Dan Penilaian PAUD:
 - a. Pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi kurikulum dan penilaian PAUD berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kurikulum dan penilaian PAUD berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - d. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD.
 - e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD.

b). Seksi Pendidikan Nonformal

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi pendidikan nonformal berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pendidikan nonformal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- d. Penyusunan bahan rumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal.
- e. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian kurikulum penyelenggaraan pendidikan nonformal.

c). Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi ketenagaan PAUD dan pendidikan nonformal berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi ketenagaan PAUD dan pendidikan nonformal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

- d. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan guru, tenaga tata usaha dan tenaga teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
- d. Pelaksanan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:

- a). Seksi Kurikulum Dan Penilaian SD
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

- b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar berdasarkan disposisi atas agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan.
 - e. Pembinaan, pemantauan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pengembangan model pembelajaran implementasi sekolah.
- b). Seksi Ketenagaan SD
- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi ketenagaan sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi ketenagaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan.
 - d. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga pendidik sekolah dasar.

e. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

c). Seksi Kesiswaan SD

a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi kesiswaan sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kesiswaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang membutuhkan.

c. Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan.

d. Pemantauan penarikan dan pemanfaatan dana dari orang tua/wali, masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan sekolah dasar.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan pendidikan SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan SMP.

c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian SMP.

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian SMP.

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri:

a). Seksi kurikulum dan penilaian SMP

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- c. Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan.
- e. Pembinaan dan pemantauan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pengembangan model pembelajaran serta implementasinya di sekolah.

b). Seksi Ketenagaan SMP

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi ketenagaan SMP berdasarkan tugas, fungsi dan restra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

- b. Pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi ketenagaan SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - d. Penyusunan bahan rumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
- c). Seksi Kesiswaan SMP
- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan rastra sebagai pedoman
 - b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kesiswaan SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - d. Pemantauan penarikan dan pemanfaatan dana dari orang tua/wali, masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan SMP.

6. Bidang Sarana Dan Prasarana

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, program

kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan dan pemeliharaan bangunan.
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan perumusan kegiatan sarana dan prasarana sekolah melalui proses perencanaan, bangunan sekolah dan perencanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.

(1) Bidang Sarana Dan Prasarana terdiri dari:

- a). Seksi sarana dan prasarana PAUD
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi sarana prasarana PAUD berdasarkan tugas, fungsi dan restra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana PAUD berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana dan prasarana PAUD.

- e. Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk PAUD.

b). Seksi Sarana Dan Prsarana SD

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi sarana dan prasarana sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi saran dan prasarana sekolah dasar berdasarkan disposisi atan agar tersedia konsep naskah yang dibutuhkan.
- c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar.
- e. Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk sekolah dasar.

c). Seksi Saran Dan Prasarana SMP

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi saran dan prasarana sekolah menengah pertama berdaarkan tugas, fungsi dan dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanakan kegiatan.
- b. Pembuat naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

- c. Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi saran dan prasarana sekolah menengah pertama.
- e. Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk sekolah menengah pertama.

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Honorer yang dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini :

Tabel IV.I : Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

No.	Pendidikan	PNS	Non PNS	Keseluruhan
	S3	1		1
	S2	11		11
	S1	33	49	82
	D3/D2/D1	3	1	4
	SLTA/SMK	18	12	30
	SMP	1		1
	Jumlah	67	62	129

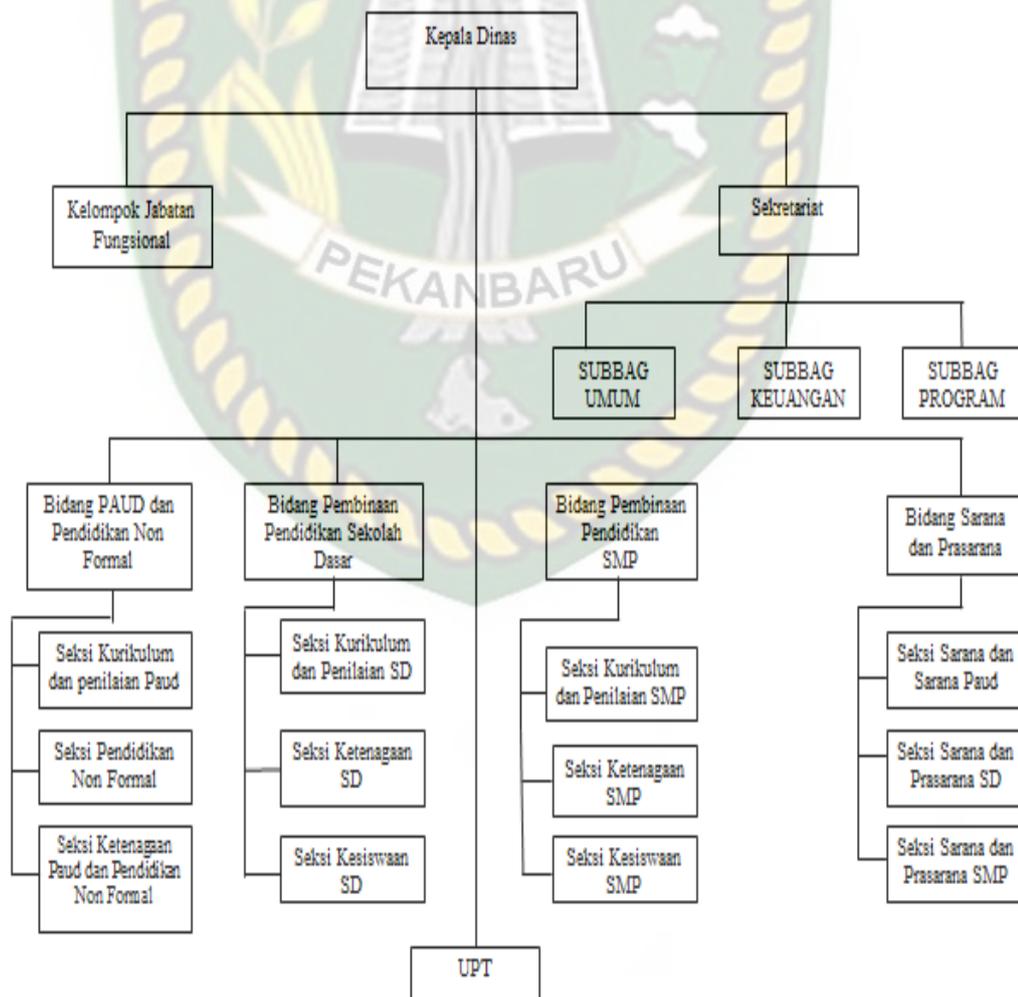
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2020

E. Sturuktur Organisasi

Struktur Organisasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jika dilihat dari Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka system yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjukkan salah seorang kepada Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja yang tinggi diantara Kepala Sub Dinas lainnya. Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut:

Gambar IV.1 Sturuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Didalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru sebagai key informan, Kepala Pembinaan Bidang SD Dinas Pendidikan Pekanbaru sebagai informan, Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru sebagai informan, Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru sebagai informan, Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru sebagai informan, Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru sebagai informan.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu :

1. Usia Informan

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel ini akan di gambarkan kriteria umur informan. Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut latar belakang usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	41 – 50 Tahun	1
2.	51 – 60 Tahun	5
Jumlah		6

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan latar belakang usia sebanyak 5 orang yang berusia 51-60 tahun, dan 1 orang yang berusia 41-50 tahun.

2. Jenis kelamin

Jenis Kelamin merupakan unsur genetika yang terdiri dari dua yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	1
2.	Wanita	5
Jumlah		6

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan jenis kelamin sebanyak 5 orang berjenis kelamin wanita dan 1 orang yang berjenis kelamin pria.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang pernah di tempuh oleh informan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang maka semakin matang pula pola pikir seseorang tersebut dalam mengambil suatu keputusan atau melaksanakan sesuatu dengan mudah sesuai dengan pemahaman pengetahuannya di bidang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat identitas informan menurut tingkat pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	1
2.	S1	5
Jumlah		6

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebanyak 5 orang yang berpendidikan S1 dan 1 orang yang berpendidikan S2.

4. Nama dan Identitas Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis akan memaparkan nama – nama dan identitas semua informan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel V.4 Nama dan identitas Responden

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Heri Jusnani	51 Tahun	Perempuan	S1	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
2.	Yurdani	56 Tahun	Laki-laki	S1	Kepala Pembinaan Bidang SD
3.	Robiah Jasni	55 Tahun	Perempuan	S1	Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru
4.	Eva Paswati	50 Tahun	Perempuan	S1	Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru
5.	Erlinawati	51 Tahun	Perempuan	S2	Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru
6.	Syarifah	47 Tahun	Perempuan	S1	Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2020

B. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan – kebutuhan pada masa ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan sangat memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, melalui sebuah proses dalam pendidikan dapat ditanamkan pemahaman mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan urgensinya.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep multidisiplin dalam melihat pembangunan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban responden dari setiap penilaian yang telah diberikan kepada responden terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, gender, dan akuntabilitas di masyarakat. Keberlanjutan sosial sebagai indikator dalam memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki – laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heri Jusnani S.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pertama melakukan program peningkatan kompetensi SDM seperti meningkatkan tenaga pendidikan, kemudian meningkatkan layanan fasilitas pembelajaran pendidikan misalnya untuk menambah ruang belajar dan perpustakaan. kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah agar menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Pelaksanaanya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari perencanaan program, perencanaan anggaran dan pelaksanaan dilapangan. Hambatan yaitu kurangnya partisipasi muali dari pihak swasta, lembaga independen dan sekolah serta peserta didik”. (23 November 2020 jam 13.20-14.13, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yurdani S.Pd selaku Kepala Pembinaan Bidang SD Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. beliau mengatakan sebagai berikut :

“Yang pertama kami melaksanakan peningkatan mutu tenaga pendidik, kedua membantu siswa dari segi biaya untuk menyelesaikan pendidikan nya. Pelaksanaannya dinas pendidikan menganggarkan dari dana apbd murni untuk meningkatkan mutu guru agar pembelajaran pendidikan kepada siswa dapat terlaksana dengan baik, Kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam menjalankan program tersebut. Hambatannya yaitu kurangnya partisipasi dari orang tua untuk melaksanakan program kegiatan karena orang tua sibuk bekerja kemudian administrasi namun tidak terlalu”. (07 Desember 2020 jam 14.13-14.54, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Robiah Jasni S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru mengenai apa saja yang membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. beliau mengatakan sebagai berikut :

“Sekarang ini kami meningkatkan SDM nya dengan guru mengikuti pelatihan, kemudian melibatkan stakeholder yang terkait dan meningkatkan kerjasama dengan wali murid untuk mengarah ke sifat pendidikan yang berkelanjutan. Pelaksanaannya setelah guru mendapatkan ilmu dari pelatihan tadi, guru mengimplementasikan melalui pengajaran dan bimbingan kepada siswa, kemudian wali murid juga memotivasi disetiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hambatannya seperti fasilitas dan SDM nya masih kurang terutama dimasa pandemi, pelatihan atau pertemuan dengan dinas melalui online itu tidak berjalan lancar dan tidak bisa terlaksana dengan bagus”. (11 Desember 2020 jam 09.30-10.34, SDN 94 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eva Paswati S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

”Pertama membekali guru dengan pelatihan, kemudian memberikan perhatian kepada siswa dalam pembelajaran, lalu mengetahui masalah siswa di disekolah dan dirumah, kemudian kami bekerjasama dengan orangtua agar siswa tidak ada masalah dalam menyelesaikan pendidikannya. Pelaksanaannya yaitu bekerja sama antara wali murid, warga lingkungan sekolah, guru, pengawas dan dinas pendidikan. Itu harus berkaitan dan juga berkelanjutan, kita selalu mendukung program pemerintah dalam membantu pendidikan anak. Hamabatannya ada dari pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam yaitu disekolah karena merasa kurang bertanggung jawab. Pihak luar seperti wali murid karena banyak wali murid yang belum mengerti dan itu kadang disebabkan oleh pendidikannya juga, hambatan di masa covid ini juga program yang kami susun hanya berjalan 25% tapi kami harus menghadapinya walaupun tidak semaksimal”. (15 Desember 2020 jam 10.12-11.12, SDN 170 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Erlinawati S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pertama kualitas daripada gurunya dulu itu ada namanya program pengembangan diri berkelanjutan. Pelaksanaannya dengan guru mengikuti kegiatan dalam bentuk pelatihan, seminar dan webinar dengan demikian guru itu akan mempunyai bekal untuk menerapkan ilmu dan melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran misal menerapkan pembelajaran dari konvensional ke paikom (pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan). Hambatannya yaitu kekurangan fasilitas misal infokus dan komputer itu masih terbatas, saat pandemi ini juga pelaksanaan zoom itu tidak semua siswa ada android dan kadang tidak cukup fasilitasnya untuk itu”.(16 Desember 2020 jam 09.14-09.54, SMPN 25 Kota Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Nurafidah S.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk membantu para siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kita melakukan kerjasama antara orangtua dan sekolah, kerjasama dalam bentuk monitoring, dimasa pandemi ini kita lebih banyak membutuhkan kerjasama orangtua daripada disekolah. Pelaksanaannya yaitu setiap guru mata pelajaran bekerjasama dengan orangtua dengan mempunyai grup yang terdiri dari siswa dan walimurid, tujuannya untuk menginformasikan segala yang ada disekolah kemudian orangtuanya yang memantau dan membimbing tentang tugas yang diberikan oleh sekolah. Pembelajaran ada daring dan luring. Daring seperti melalui classroom dan zoom. Bagi yang tidak punya hp kita berikan pendidikan secara luring dengan orangtua datang kesekolah untuk menjemput tugas yang diberikan. Hambatannya kebertasan jaringan, kuota paket karena memang ada bantuan dari pemerintah cuman belum merata kepada siswa dan guru”.(17 Desember 2020 jam 08.51-09.33, SMPN 35 Pekanbaru)

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai keberlanjutan sosial terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru adalah mengutamakan peningkatkan sdm tenaga pendidikanya dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan, kemudian melibatkan stakeholder untuk kemajuan pendidikan dan bekerjasama dengan

orangtua dalam membantu peserta didik menyelesaikan pendidikan primer dan sekundernya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 18 Desember 2020 09.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator sosial terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru dapat terlihat masih banyak yang mengeluhkan kekurangan akan SDM tenaga pendidik dan pelatihan dalam peningkatan SDM melalui webinar saat ini juga belum terlaksana dengan efektif serta pembelajaran siswa dengan sistem daring masih rendah disebabkan oleh kekurangan fasilitas dalam menggunakannya.

2. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkungan yaitu harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya. Keberlanjutan lingkungan sebagai indikator untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengetahuan lingkungan dengan membangun sekolah yang berbudaya lingkungan (Adiwiyata).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heri Jusnani S.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

Pertama melibatkan orangtua siswa dan lingkungan sekolah untuk bergotong royong menjadikan sekolah tersebut hijau dan bersih. Kedua melibatkan stakeholder terkait. Ketiga menjalankan sekolah adiwiyata, sekolah literasi, sekolah alam, sekolah sehat dan sekolah bina lingkungan. Pelaksanaannya yaitu seperti adiwiyata ini ada beberapa indikator, pertama dari sisi pembelajaran yang berwawasan lingkungan, kedua pembelajaran yang menentukan sikap sadar lingkungan, ketiga Kegiatan partisipasi masyarakat sekolah, terakhir kelengkapan sarana dan prasarana. Hambatannya yaitu kurangnya komitmen dan konsistensi warga sekolah serta kurangnya pengawasan dan juga belum ada sanksi yang tegas". (23 November 2020 jam 13.20-14.13, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yurdani S.Pd selaku Kepala Pembinaan Bidang SD Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

"Pertama melibatkan orangtua siswa dan sekolah untuk bekerjasama menjadikan sekolah tersebut hijau, bersih dan asri, kemudian melibatkan stakeholder yang bersangkutan paut dengan bidang pendidikan. Pelaksanaannya yaitu melibatkan masyarakat lingkungan sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan nyaman, kemudian melibatkan narasumber dari luar untuk mengadakan sosialisasi sekolah yang berbudaya lingkungan. Hambatannya kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, minimnya dana untuk memaksimalkan sekolah yang berbudaya lingkungan dan kurangnya pengawasan". (07 Desember 2020 jam 14.13-14.54, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Robiah Jasni S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

"Pertama menjalankan program sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, indah bersih, asri. Pelaksanaannya yaitu mensosialisasikan kepada guru, lalu guru menyampaikan ke siswa. hambatannya seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya kepedulian masyarakat". (11 Desember 2020 jam 09.30-10.34, SDN 94 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eva Paswati S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kami telah menjalankan sekolah adiwiyata dan sudah tingkat provinsi, kami juga bekerjasama untuk menciptakan sekolah yang bersih dan sehat. Pelaksanaannya yaitu guru-guru dikelas memberitahukan ke siswa bahwa kebersihan itu dari iman, kemudian melibatkan dinas lingkungan untuk memberikan bantuan seperti pupuk dan juga bekerjasama dengan masyarakat dilingkungan sekolah terutama wali murid. Hambatannya kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya kepedulian guru untuk kebersihan lingkungan sekolah”. (15 Desember 2020 jam 10.12-11.12, SDN 170 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Erlinawati S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kami mengintegrasikan tentang budaya lingkungan dalam pembelajaran, kami juga mengadakan program adiwiyata hingga tingkat provinsi, kemudian kami juga mengadakan Literasi sekolah yang juga membahas tentang lingkungan. Pelaksanaannya seperti adiwiyata itu kami melibatkan mulai dari kelas hingga organisasi osis untuk menjalankannya. Hambatannya yaitu kurangnya partisipasi dari siswa karena tidak seluruh siswa yang paham dan menyadari tentang kepedulian lingkungan”.(16 Desember 2020 jam 09.14-09.54, SMPN 25 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Nurafidah S.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam menerapkan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kami menjalankan program adiwiyata dari tingkat provinsi menuju nasional, kemudian kami mengajak siswa untuk bergotong royong dan menghias sekolah. Pelaksanaannya dengan melibatkan dinas seperti dinas kehutanan yang memberikan bantuan bunga kepada sekolah, kemudian mengajarkan kepada

siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga keutuhan taman sekolah. Hambatannya seperti ada siswa yang belum patuh dan peduli tentang kebersihan lingkungan sekolahnya". (17 Desember 2020 jam 08.51-09.33, SMPN 35 Pekanbaru)

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai keberlanjutan lingkungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru adalah dinas pendidikan bersama sekolah mengadakan dan menjalankan program adiwiyata diberbagai tingkat mulai dari kota hingga nasional, mengadakan sekolah literasi yang ada membahas tentang kepedulian lingkungan, membangun partisipasi masyarakat lingkungan sekolah untuk hidup bersih dan sehat, serta mengintegrasikan didalam pembelajaran hingga ke organisasi siswa tentang budaya lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 18 Desember 2020 09.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator lingkungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru dapat terlihat masih ada sekolah yang kesulitan untuk mengembangkan program adiwiyata ke tingkat provinsi bahkan nasional ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat sekolah dan juga dukungan material oleh stakeholder untuk menciptakan dan mengajarkan sekolah yang berbudaya lingkungan.

3. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinuitas untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral.

Keberlanjutan ekonomi sebagai indikator untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki – laki mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mewujudkannya pemerintah perlu merencanakan dengan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan melalui strategi pemberian bantuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heri Jusnani S.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pertama memberikan zakat dari dinas pendidikan, memberikan beasiswa dari pemerintah, dimasa pandemi ini memberikan kuota gratis, Kemudian bekerjasama dengan swasta misalnya dalam pembuatan pojok daring dan ada juga beasiswa dari swasta. Pelaksananya yaitu harus terpogram dan berkelanjutan artinya bisa dipertanggung jawabkan seperti data siswa yang akan diberikan bantuan beasiswa yang terdata di depodik. Hambatannya yaitu terkait administrasi data, karena data siswa ini tidak lengkap contohnya tidak ada ktp”. (23 November 2020 jam 13.20-14.13, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yurdani S.Pd selaku Kepala Pembinaan Bidang SD Dinas Pendidikan Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Selama covid ini dinas sudah menyampaikan kepada pihak sekolah untuk kelancaran program pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan dana bos, dinas juga sudah memberikan bantuan berupa KIP kepada siswa kurang mampu. Pelaksananya yaitu pembelajaran dimasa pandemi ini kita berusaha untuk melakukan pembangunan tower dan beasiswa dengan melibatkan swasta. Hambatannya seperti administrasi misal dalam program PIP itu terkendala di ktp dan kk”. (07 Desember 2020 jam 14.13-14.54, Dinas Pendidikan Pekanbaru)

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Robiah Jasni S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 94 Pekanbaru mengenai mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Disaat pandemi ini pemerintah dan swasta telah memberikan kuota. Ada juga bantuan dari PIP dan zakat dari dinas pendidikan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Pelaksanaannya bantuan berupa kuota itu digunakan untuk pembelajaran daring. Kalo zakat dari dinas pendidikan itu diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan melalui data depodik. Hambatannya kurang lengkapnya persyaratan administrasi dan kuota serta fasilitas berupa Hp untuk pelaksanaan daring”.(11 Desember 2020 jam 09.30-10.34, SDN 94 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eva Paswati S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 170 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

Ada bantuan PIP dan Itu programnya berkelanjutan sampai ke SMA. Ada juga zakat dari dinas pendidikan pemberiannya berupa satu siswa 700 rb untuk yang belum mampu. Pelaksanaannya dengan mengalir saja sesuai aturan yang berlaku jika siswa itu layak menerima maka kita salurkan,tapi ada juga terpilih dari pusat tapi dia tidak mau menerima karena dia merasa mampu jadi kita pindahkan ke yang tidak mampu. Hambatannya masih tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan kurangnya kelengkapan administrasi dari orangtua”.(15 Desember 2020 jam 10.12-11.12, SDN 170 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Erlinawati S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Ada beasiswa berupa PIP dan zakat dari dinas pendidikan serta bantuan dari dana bos. Kalo disaat covid ini ada bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan. Pelaksanaannya wali kelas mendata siswa yang tidak mampu untuk diberikan bantuan pendidikan. Hambatannya tidak lengkapnya persyaratan yang

dibutuhkan dan ini biasanya menjadi kendala bagi kami". (16 Desember 2020 jam 09.14-09.54, SMPN 25 Pekanbaru)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Nurafidah S.Pd selaku Wakil Kurikulum Kepala Sekolah SMPN 35 Pekanbaru mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Beliau mengatakan sebagai berikut :

"Kita ada dana zakat dari dinas pendidikan dan PIP, kemudian ada bantuan dari angkasa pura berupa 10 unit pada tahun 2019. Ada juga bantuan dari dinas pendidikan berupa 25 unit komputer. Pelaksanaannya mendata siswa yang tidak mampu untuk diberikan bantuan Hambatannya seperti administrasi yang belum lengkap dan ada juga bantuan yang belum dapat disebabkan kesalahan data". (17 Desember 2020 jam 08.51-09.33, SMPN 35 Pekanbaru)

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Key informan dan Informan mengenai keberlanjutan ekonomi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru adalah memprioritaskan bantuan beasiswa terutama kepada siswa-siswa yang tidak mampu dan membutuhkan dalam bentuk program Indonesia pintar, bantuan dana bos kepada setiap siswa, bantuan kuota dimasa pandemi, zakat dari dinas pendidikan, hingga bantuan yang diberikan dari pihak swasta.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 18 Desember 2020 09.00 wib, peneliti menyimpulkan dari indikator ekonomi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru dapat terlihat sebagian siswa tidak mendapatkan bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah seperti pip atau zakat dinas pendidikan, disebabkan oleh persyaratan administrasi yang belum lengkap dan tidak ada data siswa yang membutuhkan

tersebut di depodik. Kemudian Bantuan kuota juga masih ada siswa atau guru yang belum mendapatkan. Kemudian juga Fasilitas bantuan yang diberikan oleh swasta masih kurang kepada sekolah.

C. Hambatan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya hambatan yang terdapat dalam Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru ini adalah sebagai berikut :

1. Minimnya partisipasi oleh stakeholder dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang progresif.
2. Belum ada komitmen yang jelas antara pihak yang terkait untuk kemajuan pendidikan yang inklusif.
3. Rendahnya Kualifikasi SDM sekolah dan dinas pendidikan terutama dalam menerapkan pedagogi digital pada masa pandemi saat ini.
4. Rendahnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pembelajaran.
5. Administrasi yang belum lengkap dari pihak siswa menyebabkan bantuan belum bisa diberikan kepada siswa yang membutuhkan.
6. Minimnya dana untuk memaksimalkan kegiatan pendidikan seperti menerapkan sekolah yang berbudaya lingkungan.
7. Rendahnya pengawasan atau monitoring dalam kesuksesan kegiatan yang dijalankan disekolah sebab sifatnya ini adalah pembangunan yang berkelanjutan.

8. Adanya kesalahan data yang menyebabkan bantuan yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru menghasilkan beberapa kesimpulan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru di tentukan dalam 3 indikator yaitu Keberlanjutan Sosial, Keberlanjutan lingkungan, Keberlanjutan ekonomi sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Mengenai keberlanjutan sosial, dinas pendidikan sudah mengadakan pelatihan berupa seminar atau pertemuan untuk meningkatkan kompetensi kepada tenaga pendidik namun saat ini terkendala disebabkan oleh pandemi covid-19 menyebabkan beralih ke webinar yang belum efektif, kemudian sekolah membangun kerjasama dengan wali murid untuk membantu siswa menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder dalam bentuk sekolah ramah keluarga.
 - b. Mengenai keberlanjutan lingkungan, dinas pendidikan bersama sekolah mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan dengan mengadakan program adiwiyata dalam berbagai tingkat mulai dari kota hingga nasional, kemudian sekolah mengintegrasikan ke dalam

pembelajaran dikelas kepada siswa tentang wawasan budaya lingkungan dan juga sekolah mengadakan sekolah literasi yang membahas tentang kepedulian lingkungan dan menjadikannya bernilai ekonomis.

c. Mengenai keberlanjutan ekonomi, beberapa usaha telah dilakukan pemerintah melalui dinas pendidikan dalam memberikan bantuan kepada siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dengan cara memberikan bantuan berupa program Indonesia pintar, bantuan berupa dana zakat, bantuan dana bos, bantuan sarana dan prasarana, hingga bantuan kuota disaat pandemi covid-19, juga ada bantuan sedikit dari pihak swasta.

2. Kendala yang terdapat terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya partisipasi kerjasama oleh stakeholder mulai dari dinas pendidikan,sekolah dan wali murid serta swasta dan LSM dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan.
- b. Rendahnya Kualifikasi SDM sekolah dan dinas pendidikan terutama dalam menerapkan pedagogi digital pada masa pandemi saat ini.
- c. Rendahnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pembelajaran.
- d. Belum ada komitmen yang jelas antara pihak yang terkait baik dinas,sekolah dan siswa untuk kemajuan pendidikan yang inklusif.

- e. Administrasi yang belum lengkap dari pihak siswa menyebabkan bantuan belum bisa diberikan kepada siswa yang membutuhkan.
- f. Data yang tidak valid terkadang menyebabkan program bantuan pendidikan menjadi salah sasaran.
- g. Minimnya anggaran untuk memaksimalkan kegiatan pendidikan seperti menerapkan sekolah yang berbudaya lingkungan.
- h. Rendahnya pengawasan atau monitoring dalam kesuksesan kegiatan yang dijalankan disekolah sebab sifatnya ini adalah berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Pendidikan untuk kedepannya harus segera meningkatkan partisipasi bersama diantara para stakeholder secara berkelanjutan.
2. Kepada Dinas Pendidikan,sekolah dan siswa harus segera membuat dan menjalankan komitmen yang jelas dan berkelanjutan untuk mendorong kemajuan pendidikan yang inklusif.
3. Diharapkan siswa segera memenuhi dan melengkapi segala persyaratan untuk kelancaran penyaluran bantuan pendidikan.
4. Diharapkan untuk kedepannya dilakukan pemutakhiran data kepada penerima bantuan pendidikan.
5. Kepada Pemerintah harus segera memenuhi ketentuan distribusi anggaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan pihak

sekolah harus memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran tersebut demi kemajuan pendidikan.

6. Dinas pendidikan harus selalu meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan kegiatan dan kemajuan pendidikan di sekolah. Begitu juga sekolah harus selalu meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan kegiatan dan kemajuan pendidikan para siswanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri
- Asari, Hasan. 1994. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*. Bandung: Mizan.
- Brundtland Report. 1987, *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Harun, Rochajat & Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, Fuad. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaho, J. R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rasyid, M Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Reksohadiprodjo, S. & Pradono. 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: Edisi 2, BPFE.

- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung.
- _____. (2001). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soedomo, Hadi. 2008. *Pendidikan: Suatu pengantar*. Surakarta: UNS Press.
- Sonny Keraf, A. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zulkifli, Arif. 2013. *Prinsip - Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Alfalah, S. 2018. *Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik Di Sekolah Dasar Tahun 2015*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 5(9): 1–14.

- Cholik, Cecep Abdul. 2017. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol 2(1): 45–56.
- Duanti, A. K., & Arifin, A. 2018. *Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Kesejahteraan Sosial, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Di Bidang Pendidikan Tahun 2018*. 251–260.
- Febrian, R. A. (2014). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 3, 104–123.
- Ferawati, R. 2018. *Sustainable Development Goals Di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 33(2): 143-167.
- Ghany, H. 2018. *Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Sekolah Dasar*. Jurnal Madaniyah. Vol 8(2): 189–202.
- Hakim, L. 2016. *Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal EduTech. Vol 2(1): 53–64.
- Hapsari, G. D. 2019. *Upaya Indonesia Dalam Pengendalian Tembakau Untuk Mencapai Target 3 . A Sustainable Development Goals Tahun 2017-2019*. Jurnal Sociae Politics. Hal 58-83.
- Haryanah, N. 2004. *Rekonstruksi Sistem Pendidikan di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Jurnal Sosial Dan Pembangunan. Vol 20(4):

540–554.

Mukhlis, I. 2009. *Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 14(3): 1–9.

Mulianto, B. (2014). *Program Fasilitasi Biaya Hidup Bagi Lanjut Usia Dalam Tinjauan Sosiologi Pemerintahan*. Vol 23(2), 48–63.

Munaf, Y., Febrian, R. A., & S, R. S. (2018). *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)*. Jurnal Wedana Vol IV(2), 559–567.

Nazir, Y. (2018). *Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Kekayaan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal Kajian Pemerintah Vol IV(1),44-55

Nurkholis, A. 2016. *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Syariah. Hal 1-16.

Ordóñez, C; P. N. Duinker, 2010. *Interpreting Sustainability for Urban Forests*. Jurnal Canada. Vol 2(6) hal 1511-1522.

Pratiwi, I. 2019. *Efek Program PISA Terhadap Kurikulum Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. Vol 4(1): 51–71.

Pratiwi, dkk. 2018. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Vol 18(1): 1–13.

Pribadi, R. 2017. *Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) Dalam*

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua. Journal Ilmu Hubungan Internasional. Vol 5(3): 917–932.

Pujayanti, D. 2020. *Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals Di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pemuda & Ekonomi Islam. Vol 1(1): 20–33.*

Sulistyastuti, D. R. 2007. *Pembangunan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol 2(2).*

Tohir, M. 2019. *Hasil PISA Indonesia Tahun 2018. Paper of Matematohir. Vol2(1): 1–2.*

Tristananda, Putu Wulandari. 2018. *Membumikan Education For Sustainable Deveolment (ESD) Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu – Isu Global. Jurnal Agama Dan Budaya. Vol 2(2), 42–49.*

Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2020